

Menlu Tegaskan Pentingnya Pendekatan Konstruktif ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.WARTAWAN.ORG

Jan 29, 2026 - 14:23



Menlu Tegaskan Pentingnya Pendekatan Konstruktif ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar

Menlu RI, Sugiono telah menghadiri Extended Informal Consultation on The Implementation of The Five-Point Consensus. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (AMM) Retreat ASEAN yang dilakukan di Cebu, Filipina.

Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Filipina selaku Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar memberikan briefing mengenai perkembangan terkini situasi di Myanmar. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) serta prioritas kerja ASEAN ke depan dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar.

Menlu RI menegaskan bahwa situasi di Myanmar merupakan salah satu

tantangan bagi ketangguhan dan kredibilitas ASEAN.

“Hal ini (kunjungan utsus ke Myanmar) menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama,” tegas Menlu.

Berangkat dari komitmen bersama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan, ASEAN diharapkan dapat terus terlibat secara konstruktif dan konsisten dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar.

Secara khusus, Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap upaya Menteri Luar Negeri Filipina yang telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar. Langkah ini dinilai sebagai kontribusi nyata yang relevan.

Ke depan, dibutuhkan upaya-upaya terukur dan kreatif untuk membangun stabilitas yang langgeng dan inklusif, serta fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan bangsa (nation-building) Myanmar.

Sebagai bentuk komitmen konkret, Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dengan seluruh pihak terkait di Myanmar.

“Indonesia juga terbuka untuk menawarkan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman berharga kami dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah,” pungkas Menlu.